

LKJIP 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	1
1.4 Sumber Daya Manusia	3
1.5 Aspek Strategis Organisasi	6
1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja Utama	20
2.3 Perjanjian Kinerja	20
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018	22
2.5 Target Belanja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja	27
3.3 Realisasi Anggaran	46
BAB IV : PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKJIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Plt. Sekretaris Daerah,



Dr. Hj. Meiliana, S.E., M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan rangkuman pencapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1 Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100,00
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					100,00
2 Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	20	?	
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					-
3 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	669	109,67
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					109,67
4 Terwujudnya bantuan hukum, dan aparaturnya/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	15	17	113,33
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					113,33
5 Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	65	66,89	102,91
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					102,91
6 Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100,00
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					100,00
7 Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	5	2	40,00
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran					40,00
8 Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8 Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	5,5	3,24	58,91
	9 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	4,7	2,67	56,81

Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran						57,86	
9	Meningkatnya fungsi koordinasi, perencanaan dan perumusan di bidang kesejahteraan rakyat	10	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5	6,08	82,24
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran						82,24	
10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100,00
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran						100,00	
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	12	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	85	82,15	96,65
		13	Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	80	74,89	93,61
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran						95,13	
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	14	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtangaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	98	99	101,02
Rata - Rata Capaian Indikator Sasaran						101,02	
Rata - Rata Capaian Seluruh Indikator Sasaran						83,51	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering :

1. Pendidikan

Sampai dengan Per 1 Maret 2018 Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 379 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim dari 379 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S1 menduduki urutan Kedua dengan jumlah 132 orang urutan pertama adalah pendidikan SLTA yaitu sebanyak 127 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 73 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim keadaan bulan Maret tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim
Menurut Pendidikan Tahun 2018

No.	Eksekutif/Biro	S.3	S.2	S.1	SM	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Asisten	1	2	-	-	-	-	-	3
3	Staf ahli	-	2	1	-	-	-	-	3
4	Tenaga Ahli	3	-	-	-	-	-	-	3
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	-	8	14	1	12	-	-	35
6	Biro Hukum	-	9	17	1	1	-	-	28
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	9	14	0	7	-	-	30
8	Biro Perekonomian	-	7	15	1	7	-	-	30

9	Biro Administrasi Pembangunan	-	6	11	3	4	-	-	24
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	-	7	12	1	4	-	-	24
11	Biro Hubungan Masyarakat	-	9	16	1	17	-	-	43
12	Biro Umum	-	5	23	6	68	15	13	130
13	Biro Organisasi	-	9	9	1	7	-	-	26
Jumlah		4	73	132	15	127	15	13	379
Keadaan Per 1 Maret 2018									
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)									

2. Golongan, Eselon dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan Per 1 Maret 2018 PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim yang memiliki golongan III sebanyak 379 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 101 orang, golongan IV sebanyak 71 orang dan golongan I sebanyak 22 orang.

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur
Setda Provinsi Menurut Golongan Tahun 2018

No.	Eksekutif/Biro	GOL. IV	GOL.III	GOL. II	GOL. I	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	0
2	Asisten	3	-	-	-	3
3	Staf ahli	3	-	-	-	3
4	Tenaga Ahli	3	-	-	-	3
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	6	22	6	1	35
6	Biro Hukum	9	17	2	-	28
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	9	19	2	-	30
8	Biro Perekonomian	7	21	2	-	30
9	Biro Administrasi Pembangunan	5	16	3	-	24
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	4	19	1	-	24
11	Biro Hubungan Masyarakat	9	20	14	-	43
12	Biro Umum	6	39	64	21	130
13	Biro Organisasi	7	12	7	-	26
Jumlah		71	185	101	22	379
Keadaan Per 1 Maret 2018						
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)						

Berdasarkan Per 1 Maret 2018 Jumlah Eselon Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 130 orang dengan berbagai tingkat Eselon mulai dari Eselon I sampai dengan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Setda Provinsi Kaltim berdasarkan Eselon :

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur
Setda Provinsi Kaltim Per Eselon Tahun 2018

No.	EKSEKUTIF/BIRO	Eselon I.B	Eselon II.A	Eselon II.B	Eselon III.A	Eselon IV.A	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	-	1
2	Asisten	-	3	-	-	-	3
3	Staf ahli	-	3	-	-	-	3
4	Tenaga Ahli	-	6	-	-	-	6
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	-	-	1	3	9	13
6	Biro Hukum	-	-	1	3	9	13
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	1	3	9	13
8	Biro Perekonomian	-	-	1	3	9	13
9	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	1	3	9	13
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	-	-	1	3	9	13
11	Biro Hubungan Masyarakat	-	-	1	3	9	13
12	Biro Umum	-	-	1	3	9	13
13	Biro Organisasi	-	-	1	3	9	13
Jumlah		1	12	9	27	81	130
Keadaan Per 1 Maret 2018							
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)							

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim
Berdasarkan Kriteria Gender Tahun 2018

No.	EKSEKUTIF/BIRO	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	0	-	0
2	Asisten	2	1	3
3	Staf ahli	3	-	3
4	Tenaga Ahli	2	1	3
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	20	15	35
6	Biro Hukum	16	12	28
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	17	13	30
8	Biro Perekonomian	19	11	30
9	Biro Administrasi Pembangunan	14	10	24
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	17	7	24
11	Biro Hubungan Masyarakat	29	14	43
12	Biro Umum	101	29	130
13	Biro Organisasi	18	8	26
Jumlah		258	121	379
Keadaan Per 1 Maret 2018				
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)				

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

- a) Lemahnya database capaian kinerja penyelenggaraan daerah
- b) Kurangnya komitmen daerah terhadap kesepakatan penetapan batas wilayah
- c) Penyelesaian proses penetapan lokasi lahan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan target karena belum lengkap data kepemilikan lahan
- d) Masih kurangnya persyaratan administrasi Kepala Daerah dan DPRD Prov. dan Kab/Kota yang belum lengkap sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi
- e) Belum adanya aturan mengenai pelaksanaan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan baik Provinsi maupun Kab/Kota
- f) Belum mantapnya pemahaman koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat terutama berkaitan dengan program lintas sektor

- g) Masih ada Peraturan yang tidak Sinkron dan Harmonis
- h) Belum adanya kebijakan perekonomian daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim secara nyata
- i) Kurang Sinergisitas Antara Pembangunan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- j) Pemahaman Tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
- k) Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan
- l) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal
- m) Perangkat Daerah yang belum efektif, efisien dan akuntabel
- n) Belum Optimalnya Kontrol atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas
- o) Belum Optimalnya kontrol atas Tata kelola aset setda, pelayanan kegiatan pimpinan dan Pelayanan Publik yang berkualitas
- p) Masih adanya pemberitaan/publikasi pers dan media massa yang bersifat negatif.
- q) Tuntutan pelayanan terhadap masyarakat, tamu pemerintah daerah dan pimpinan semakin tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018 telah dilakukan reviu pada tahun 2017 dengan Indikator Kinerja serta target – target yang telah disesuaikan dengan rekomendasi Inspektorat Prov. Kaltim.

Tabel yang mencangkup garis besar perencanaan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab		
					2014	2015	2016	2017	2018			
Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik	Predikat LPPD	1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1	Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Biro PPOD
		2	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	2	Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	10	10	20	20	20	Biro Humas
Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	3	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	964	847	816	939	610	Biro Hukum
		4	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparat/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4	Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	9	6	8	8	15	Biro Hukum

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	
Mewujudkan kepastian batas antar wilayah	Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	5 Meningkatkan Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	31,93	41,79	44,15	62,61	65	Biro PPOD
Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel	Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	6 Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100	100	100	Biro Adbang
		7 Meningkatkan Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7 Pengaduaan lelang melalui ULP	Pengaduan	4	5	5	5	5	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target					Penanggung Jawab
							2014	2015	2016	2017	2018	
Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8	Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	7,04	5,11	3,39	3,15	5,5	Biro Perekonomian
				9	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	1,71	-1,21	-0,38	3,13	4,7	
Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	10	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,42	6,23	6,11	6,19	5	Biro Kesra
Terwujudnya citra positif Pemprov Kaltim	Prosentase berita positif pembangunan daerah	10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	75	78	80	85	90	Biro Humas
Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Provinsi	11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	12	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	70 (baik)	75 (baik)	80 (sangat baik)	83 (sangat baik)	85 (sangat baik)	Biro Org
				13	Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	72,00 (B+)	74,00 (B+)	76,00 (B+)	78,00 (B+)	80,00 (A)	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target					Penanggung Jawab	
						2014	2015	2016	2017	2018		
Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik		12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	14	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	95	95	96	97	98	Biro Umum

Tabel 2.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,
Program dan Kegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik	Predikat LPPD	1 Meningkatkan Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Biro PPOD
		2 Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah	2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Biro Humas
						Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama	
Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	3 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Biro Hukum
					Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	
		4 Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4 Prosentase penyelesaian advokasi Bantuan Hukum	Persentase	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	
						Peningkatan Penyelesaian Sengketa	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab		
Mewujudkan kepastian batas antar wilayah	Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	5	Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	5	Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintah Daerah	Biro PPOD
							Pembakuan nama rupabumi		
							Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah		
Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel	Prosentase program/kegiatan yang strategis sesuai rencana	6	Terwujudnya pelayanan administrasi pembangunan sesuai dengan rencana	6	Prosentase program/kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Biro Adbang
							penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		
		7	Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7	Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Rapat koordinasi Administrasi Pembangunan	
							Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan		
							Penyusunan Pengendalian Program		
							Monitoring evaluasi Pembangunan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8	Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	Program Kebijakan Penanaman Modal Perusda dan Lembaga Keuangan	Koordinasi Kebijakan Perusda dan Lembaga Keuangan	Biro Perekonomian
				9	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase		Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal	
							Program Pengembangan Produksi Daerah dan SDA	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pertanian	
								Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	
							Program Peningkatan Sinerji Kebijakan Ekonomi Daerah	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	
								Koordinasi Penyaluran Raskin	
								Koordinasi Peningkatan Ekspor Impor/Directcall	
							Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinerji pada Bidang Industri dan Jasa	Koordinasi dan Sinerji Sektor Pariwisata	
								Koordinasi dan Sinerji Sektor Perhubungan dan Pariwisata	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab			
Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	10	Tingkat Kemiskinan	Persentase	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Keagamaan dan Kesehatan	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Keagamaan dan Bidang	Biro Kesra	
								Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kesehatan dan Bidang		
								Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang		
								Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Pemuda dan Olahraga dan Bidang		
								Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bidang		
								Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bidang		
								Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang		Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya citra positif Pemprov Kaltim	Prosentase berita positif pembangunan daerah	10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Jejaring kehumasan	Biro Humas
								Kerjasama media	
							Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Publikasi dan Dokumentasi	
								Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	
							Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Pelayanan Keprotokolan	
								Peningkatan komunikasi keProtokolan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab			
Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Provinsi	11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	12	Skor rata-rata SKM unit pelayanan	Skor	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Biro Org	
							Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Laksanaan Pelayanan Publik		
				13	Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
			12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	14	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Biro Umum
								Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		
							Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Inventarisasi Barang dan Aset Daerah			

2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	3<ST<4=Sangat Tinggi, 2<T<3=Tinggi, 1<S<2=Sedang, 0<R<1=Rendah	Biro pemerintahan dan Perbatasan
2	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	2 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	dokumen	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang masuk}}{\text{Jumlah produk hukum yang diselesaikan}} \times 100\%$	Biro Hukum
3	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	3 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya kerjasama antar daerah	4 Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	Jumlah Perjanjian kerjasama (MoU) yang terealisasi	Biro pemerintahan dan Perbatasan
5	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	$\frac{\text{Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas}}{\text{Jumlah seluruh Batas Wilayah}} \times 100\%$	
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	$\frac{\text{program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana}}{\text{Jumlah seluruh program/ kegiatan}} \times 100\%$	Biro Pembangunan Daerah
7	Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	Angka Absolute	
8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8 Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	Oleh BPS	Biro Perekonomian
		9 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	Oleh BPS	
9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	10 Tingkat Kemiskinan	Persentase	Oleh BPS	Biro Kesejahteraan Rakyat
10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	$\frac{\text{Berita Positif}}{\text{Jumlah seluruh Berita}} \times 100\%$	Biro Humas
11	Terwujudnya organisasi tataaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	12 Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	Survey IKM	Biro Organisasi
		13 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	Sesuai dengan Bobot dari Hasil Laporan Evaluasi (LHE)	
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	14 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	Survey IKM	Biro Umum

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	20
3	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610
4	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	15
5	Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	65
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100
7	Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	5
8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8 Tingat Inflasi Kaltim	Persentase	5,5
		9 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	4,7
9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	10 Tingkat Kemiskinan	Persentase	5
10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional,	12 Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	85 (sangat baik)
		13 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	80,00 (A)
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	14 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtangaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	98

Total Pagu Anggaran Tahun 2018 Sebesar Rp.154.109.179.607,-

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.154.109.179.607,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp.182.446.211.826,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 75.272.990.906,- dan Belanja Langsung Rp. 107.173.220.920,-.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 156.117.111.032,- (85,57%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 54.124.799.034,- (71,90 %) belanja langsung sebesar Rp. 101.992.311.998,- (95,17%).

2.5 Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.5
Target Belanja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	75.272.990.906	54.124.799.034	71,90
2	Belanja Langsung	107.173.220.920	101.992.311.998	95,17

2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Anggaran

Sasaran Strategis		Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	377.900.000	Biro PPOD
2	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	410.000.000	Biro Humas
			Peningkatan dan Pembinaan Administrasi Kerjasama	290.000.000	
3	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	350.000.000	Biro Hukum
		Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	300.000.000	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	700.000.000	
4	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	490.000.000	
			Peningkatan Penyelesaian Sengketa	160.000.000	
5	Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintah Daerah	208.000.000	Biro PPOD
			Pembakuan nama rupabumi	225.400.000	
			Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi anatar daerah	496.100.000	
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	178.950.000	Biro Adbang
			penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	173.700.000	
7	Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Rapat koordinasi Administrasi Pembangunan	147.500.000	
			Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan	1.138.000.000	
			Penyusunan dan Pengendalian Program	1.995.402.000	
			Monitoring dan evaluasi Pembangunan	1.911.000.000	

Sasaran Strategis		Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	Program Kebijakan Penanaman Modal Perusda dan Lembaga Keuangan	Koordinasi Kebijakan Perusda dan Lembaga Keuangan	244.800.000	Biro Prekonomian
			Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal	225.000.000	
		Program Pengembangan Produksi Daerah dan SDA	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pertanian	155.000.000	
			Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	155.000.000	
		Program Peningkatan Sinerji Kebijakan Ekonomi Daerah	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	202.000.000	
			Koordinasi Penyaluran Raskin	75.000.000	
			Koordinasi Peningkatan Ekspor Impor/Directcall	83.000.000	
		Program Peningkatan Fasilitas dan Sinerji pada Bidang Industri dan Jasa	Koordinasi dan Sinerji Sektor Pariwisata	80.000.000	
Koordinasi dan Sinerji Sektor Perhubungan dan Pariwisata	60.000.000				
9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan	1.159.400.000	Biro Kesra
			Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesehatan	215.000.000	
		Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1.173.300.000	
			Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemuda dan Olahraga	214.500.000	
		Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	453.000.000	
			Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	204.100.000	
		Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat	204.100.000	

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab	
10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Jejaring kehumasan	150.000.000	Biro Humas
			Kerjasama media	194.000.000	
		Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Publikasi dan Dokumentasi	6.097.773.000	
			Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	172.000.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Pelayanan Keprotokolan	297.500.000	
			Peningkatan komunikasi keProtokolan	307.500.000	
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	36.000.000	Biro Org
		Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Laksanaan Pelayanan Publik	290.200.000	
		Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	184.000.000	
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	15.733.387.325	Biro Umum
			Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	14.087.953.595	
		Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.641.700.000	
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	452.500.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Inventarisasi Barang dan Aset Daerah	490.000.000	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi
Tahun 2016 – 2017

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	21.58	22.07
2	Pengukuran Kinerja	25%	15.31	17.19
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.88	9.67
4	Evaluasi Kinerja	10%	5.70	5.99
5	Capaian Kinerja	20%	10.79	7.36
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	64.26	62.28
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

- Sekretariat Daerah telah melakukan reviu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017.
- Telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja secara berjenjang.
- Telah menyusun dokumen Rencana Aksi.
- Membuat cascading dari sasaran Rencana Strategis sesuai dengan penjabaran visi dan misi RENSTRA.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2018

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
2	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	20	20	100
3	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	669	109,67
4	Terwujudnya bantuan hukum dan aparaturnya masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	15	17	113,33
5	Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	65	66,89	102,91
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100
7	Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	5	1	0,2
8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8 Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	5,5	3,24	58,91
		9 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	4,7	2,67	56,81
9	Meningkatnya fungsi koordinasi, perencanaan dan perumusan di bidang kesejahteraan rakyat	10 Tingkat Kemiskinan	Persentase	5	6	82,24
10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	12 Skor SKM rata-rata unit pelayanan	Skor	85	82,15	96,65
		13 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	80	74,89	93,61
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	14 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	98	99	101,02

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas LPPD.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1. Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100,00

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100,00

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan :

Belum maksimalnya data capaian kinerja dari Kab/Kota yang merupakan data agregasi untuk pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim

➤ Alternatif solusi

Melakukan optimalisasi data capaian kinerja Kab/Kota melalui Monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada Pemerintah Kab/Kota dan Rapat Koordinasi Optimalisasi LPPD. Sebelum dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilaksanakan oleh Timda maupun Timnas EKPPD.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1 Meningkatnya Kualitas LPPD	100,00	99,00	1,00

3.2.2 Sasaran 2 : *Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	20	?	?

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	38	38	38	-

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	20	?	?

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Permasalahan
- Alternatif solusi

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	?	96,56	

3.2.3 Sasaran 3 : *Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	669	109,67

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	816	939	669	-28,75%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	669	109,67

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Permasalahan
 1. Kurangnya SDM Profesional dalam menelaah Perda/Perbup.
 2. Masih adanya semangat egoisme sektoral (departemental) dari masing-masing instansi terkait.
- Alternatif solusi
 1. Pembentukan database peraturan yang lengkap dan akurat
 2. Tuntutan Masyarakat terhadap Kemudahan akses Produk Hukum

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
3 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	109,67	98,51	11,16

3.2.4 Sasaran 4 : *Terwujudnya bantuan hukum,dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	15	17	113,33

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	8	8	17	112,50%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	15	17	113,33

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan

Proses Perkara masih berlanjut di Pengadilan Tinggi (Banding) dan di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi).

➤ Alternatif solusi

1. Instansi / tergugat agar menyimpan / mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum / perkara, dan menyerahkannya ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim;
2. Seluruh Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur cq. Biro Hukum untuk diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya, dan tidak menghambat iklim investasi / biaya ekonomi tinggi;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
4 Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	113,33	97,43	15,90

3.2.5 Sasaran 5 : *Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	65	66,89	102,91

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	44,15	62,61	66,89	6,84%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	65	66,89	102,91

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan

- Masalah batas Kab. Berau Kaltim dgn Kab. Bulungan Kaltara, saling klaim kepemilikan wilayah karena terdapat goa sarang burung walet dan ijin pemanfaatan lahan yg tumpang tindih dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten.

2. Masalah batas Kab. Kutim dgn Kab. Berau, "ruas batas mangkok" saling klaim kepemilikan wilayah karena terdapat ijin kebun sawit yg dikeluarkan Kab. Berau dan terdapat penduduk Kab. Kutim.
 3. Masalah batas Kab. Kutim dgn Kota Bontang terkait 7 RT di Sidrap Kec. Teluk Panda Kutim yg ingin bergabung dgn Kota Bontang, Padahal batasnya sudah ditetapkan oleh Mendagri thn 2015.
 4. Masalah Batas Kab. Kubar dgn Kab. Mahulu yakni garis batas yg disepakati oleh kampung yg berbatasan tidak sesuai dgn keinginan Tim Batas Kab Kubar.
 5. Masalah batas Kab. Mahulu, Kaltim dgn Kab. Murung Raya, Kalteng terkait peta dasar RBI yg dipergunakan untuk mendelineasi garis batas yg dikeluarkan BIG berbeda antara tahun 2016 dgn tahun sebelumnya.
 6. Masalah batas Kab. Kubar, Kaltim dgn Kab. Barito Utara, Kalteng terkait Ijin tambang batu bara PKP2B PT. Bharinto Ekatama lintas provinsi dimana Tim Batas Prov Kalteng dan LSM Kalteng menghendaki agar semua areal konsesi perusahaan tersebut masuk wilyah Kalteng sedangkan titik batas sudah pernah disepakati thn 2009 dan telah dipasang pilar permanen.
 7. Masalah batas Kab. Paser dgn Kab. PPU terkait ijin perkebunan PT. Gawi Makmur Kalimantan yg lintas kabupaten tetapi Kab. PPU menghendaki agar perusahaan terebut masuk ke wilayahnya sesuai garis batas indikatif UU Pembentukan Kab. PPU sedangkan kajian teknis penarikan garis batas oleh Kab. Paser membagi areal perusahaan tersebut.
 8. Masalah titik pertigaan batas antara Kab. Kubar, Kab. Paser dgn Kab. PPU dimana Kab. Paser tidak menerima titik pertigaan batas kajian provinsi berdasarkan UU Pembentukan Kab. PPU dan mengusulkan garis bts versinya.
 9. Masalah batas Kab. Paser, Kaltim dgn Kab. Kota Baru, Kalsel, terkait ijin perkebunan sawit yg dikeluarkan Kota Baru tidak sesuai dgn batas di lapangan yg diinginkan masyarakat berbatasan
 10. Masalah batas Kab. Paser, Kaltim dgn Kab. Mamuju, Sulbar, terkait UU Pembentukan Prov. Sulbar memasukan gugusan kepulauan Balagbagan ke Sulbar padahal secara geografis kepulaun tersebut lebih dekat dgn Kaltim.
- Alternatif solusi
1. Batas provinsi merupakan wewenang tim batas pusat oleh karena itu tim pusat agar segera memfasilitasi pembahasan permasalahan tersebut
 2. Tim PBD provinsi pernah membuat tarikan batas dan menawarkan kpd kedua kabupaten thn 2014 namun ditolaknya oleh karena itu perlu pembahasan lagi dgn terlebih dahulu survey lapangan untuk memperoleh data terbaru kemudian mendorong kedua kab. Untuk menyerahkan penyelesaiannya ke provinsi sesuai wewenang gubernur.
 3. Telah dilakukan survey untuk memetakan wilayah dimaksud yg ingin bergabung dgn Bontang dan akan mengundang kedua ketua Tim PBD/ kepala daerah untuk pembahasan lanjutan dan jika disetujui hasilnya akan dibawa ke Mendagri untuk perubahan batas tersebut.

4. Mendorong Tim batas Kab. Kubar agar menyepakati Berita Acara kesepakatan batas yg dibuat oleh Kampung/Desa berbatasan karena penegasan batas bersifat Buttom up kecuali tidak terdapat dokumen kesepakatan batas maka tim batas kab. Boleh mengambil sikap.
5. Memastikan data peta RBI yg boleh dipergunakan dalam mendelineasi batas sesuai aturan dan menyampaikan ke tim pusat untuk menindaklanjuti pembahasan.
6. Tim PBD povinsi tetap berpegang pada kesepakatan batas thn 2009 dan mendorong pusat untuk pembahasan lanjutan batas yg belum disepakati saat ini.
7. Tim PBD provinsi mengundang lagi kedua tim batas kabupaten untuk pembahasan dan jika tidak ada progres kesepakatan maka penyelesaiannya harus diserahkan ke provinsi.
8. Tim PBD provinsi mengundang lagi ketiga tim batas kabupaten untuk pembahasan dan jika tidak ada progres kesepakatan maka penyelesaiannya harus diserahkan ke provinsi.
9. Penyelesaiannya telah diambil alih pusat dan telah dilakukan pembahasan draf permendagri dan mendorong pusat agar batas tersebut sesuai dgn kesepakatan masyarakat.
10. Mengupayakan melakukan yudicial review UU pembentukan Prov. Sulbar ke Mahakam Konstitusi (MK)

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
5 Meningkatkan Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	102,91	99,35	3,56

3.2.6 Sasaran 6 : *Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100,00

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100	-

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100,00

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan

1. Kurang Sinergisitas Antara Pembangunan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
2. Pembebasan lahan yang bermasalah.
3. Kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusan.
4. Ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi.

➤ Alternatif solusi

1. Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan.
3. Mengembangkan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
6 Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana		79,37	

3.2.7 Sasaran 7 : *Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	5	5	100,00

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan				

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
7 Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	5		-

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Permasalahan
 1. Pemahaman Tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan
 3. Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
 4. Sanggah atas dasar kesalahan evaluasi
- Alternatif solusi
 1. Diklat Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa
 3. Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
 4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan
 5. Mengembangkan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
7 Meningkatkan Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP		89,97	

3.2.8 Sasaran 8 : Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
8 Tingat Inflasi Kaltim	Persentase	5,5	3,24	58,91
8 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	4,7	2,67	56,81

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
8 Tingat Inflasi Kaltim	Persentase	3,39	3,15	3,24	2,86%
8 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	-0,38	3,13	2,67	-14,70%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
8 Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	5,5	3,24	58,91
8 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	4,7	2,67	56,81

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan

1. Naiknya harga barang pada hari-hari besar dan diakhir tahun.
2. Tingginya harga BBM dan TDL dan berkurangnya subsidi.
3. Minimnya intervensi pemda terhadap gejolak pasar.
4. Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis.
5. Terbatasnya jumlah komoditi bahan pokok dan strategis yang dihasilkan Kaltim

➤ Alternatif solusi

1. Dengan adanya kestabilan harga
2. Memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM
3. Mendatangkan dari luar daerah.
4. Mendorong produktifitas komoditi dalam daerah
5. Melakukan koordinasi dengan distributor dan instansi teknis terkait

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
8 Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	57,86	98,78	(40,92)

3.2.9 Sasaran 9 : *Meningkatnya fungsi koordinasi, perencanaan dan perumusan di bidang kesejahteraan rakyat.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
9 Tingkat Kemiskinan	Persentase	5	6,08	82,24

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
9 Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,11	6,19	6,08	-1,78%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
9 Tingkat Kemiskinan	Persentase	5	6,08	82,24

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan

1. Laju penurunan angka kemiskinan cenderung melambat;
2. Masih ada angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan pemutusan hubungan kerja sektor SDA dan terbatasnya sumber pencaharian.
4. Belum efektifnya Pengendalian dan koordinasi pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di SKPD dan Kabupaten/Kota
5. Belum tersedianya data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat dengan baik
6. Belum adanya kesatuan data untuk dibidang kesejahteraan rakyat
7. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya
8. Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah
9. Belum optimalnya peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat

➤ Alternatif solusi

1. Pembangunan infrastruk-tur untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik;
2. Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kaltim;
3. Hilirisasi sektor primer dan pencarian sumber ekonomi alternatif;

4. Meningkatkan efektivitas Pengendalian dan koordinasi pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di SKPD dan Kabupaten/Kota
5. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat dengan baik
6. Perlu adanya kesatuan data untuk dibidang kesejahteraan rakyat
7. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya
8. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah
9. Meningkatkan peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
9 Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	82,24	87,77	(5,53)

3.2.10 Sasaran 10: *Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
10 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100,00

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
10 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	80	85	90	5,88%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
10 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100,00

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan

1. Kurang cepatnya Pemerintah Provinsi dalam melakukan Jawaban terhadap permasalahan yang menjadi Permasalahan / Isu ditengah Masyarakat.
2. Terbatasnya informasi / kurang cepat melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul ditengah masyarakat.

➤ Alternatif solusi

1. Melakukan komunikasi yang intens / berkesinambungan antara pemerintah, media massa dan masyarakat.
2. Menjalin kerjasama dengan media-media sebagai bentuk menginformasikan keberhasilan Pemerintah terhadap pembangunan.
3. peningkatan komunikasi serta kerjasama kehumasan dan keprotokolan
4. peningkatan akses pelayanan dan penyediaan informasi publik
5. pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana teknologi informasi
6. penerapan dan penintgkatan sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
10 Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	100,00	99,29	0,71

3.2.11 Sasaran 11: *Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel.*

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
11 Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	85	82,15	96,65
11 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	80	74,89	93,61

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
1 Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	75	80,56	82,15	1,97%
1 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	77,37	77,5	74,89	-3,37%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
11 Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	85	82,15	96,65
11 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	80	74,89	93,61

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Permasalahan Indikator Kinerja Skor SKM rata2 unit pelayanan :
1. Belum menjadi penganggaran prioritas di Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan.
 2. Hasil survei belum menjadi bahan evaluasi perbaikan pelayanan sesuai dengan unsur survei, seperti perbaikan pelayanan terkait kecepatan pelayanan, hal-hal yang berpengaruh jumlah pegawai, kompetensi dan saptas, jika tidak dianggarkan perbaikan hasil evaluasi maka dimungkinkan hasil survei selanjutnya sulit mengalami peningkatan.

- Permasalahan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Provinsi :
 1. Kepala Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengeri dengan apa yang direncanakan (Renstra).
 2. Indikator Program dan Kegiatan masih ada yang belum SMART.
 3. Evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian hanya sebatas evaluasi Kerja dan Anggaran belum sampai Evaluasi Kinerja.
 4. Belum menerapkan budaya kinerja.
 5. Hasil Evaluasi Kinerja belum dijadikan dasar dalam Kenaikan Promosi Jabatan dan Mutasi Jabatan.

- Alternatif solusi Indikator Kinerja Skor SKM rata2 unit pelayanan :
 1. Menjadikan SKM Program Prioritas bagi penyelenggara pelayanan publik;
 2. Menjadikan Perangkat daerah penyelenggara pelayanan menjadikan SKM sebagai program prioritas;

- Alternatif solusi Indikator Nilai Akuntabilitas Provinsi :
 1. Kendala Provinsi Kaltim dalam memperoleh predikat penilaian A selain hal tersebut diatas adalah masih mengandalkan Inspektorat dalam Pengawasan, seharusnya Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah langsung yang memiliki peran tersebut.

 2. Kementerian PAN dan RB juga mengharapkan BAPPEDA Prov. Kaltim melakukan Analisa Kajian dan Evaluasi Program kegiatan yang mendukung Sasaran RPJMD dengan memperhatikan keterkaitan Program kegiatan pada RPJMD (Apakah berdampak atau tidak terhadap pencapaian prioritas pada RPJMD). Efisiensi terhadap biaya overhead, Program Kegiatan Perangkat Daerah harus selaras dengan Program kegiatan RPJMD agar lebih fokus dalam pencapaian Kinerja.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
11 Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	95,13	93,63	1,50

3.2.12 Sasaran 12 : Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
12 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	98	99	101,02

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan Penurunan Tahun 2018
		2016	2017	2018	
1 2 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	97	98	99	1,02%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Pencapaian
12 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	98	99	101,02

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

➤ Permasalahan :

1. Belum Efektifnya Sistem dan Mekanisme Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran di Lapangan
2. Kurangnya Pengetahuan dan Skill Petugas Layanan di Biro Umum
3. Banyaknya Kegiatan / Acara Pimpinan yang tidak terjadwal / terprediksi
4. Distribusi SDM belum sesuai Kompetensi pada masing - masing Bidang

➤ Alternatif solusi

1. Kendala Provinsi Kalimantan Timur dalam memperoleh predikat penilaian A selain hal tersebut diatas adalah masih mengandalkan Inspektorat dalam Pengawasan, seharusnya Kepala/ Pimpinan Perangkat Daerah langsung yang memiliki peran tersebut.
2. Kementerian PAN dan RB juga mengharapkan BAPPEDA Prov. Kaltim melakukan Analisis Kajian dan Evaluasi Program Kegiatan yang mendukung Sasaran RPJMD dengan memperhatikan keterkaitan Program kegiatan pada RPJMD (Apakah berdampak atau tidak terhadap pencapaian prioritas pada RPJMD), Efisiensi terhadap biaya overhead, Program kegiatan Perangkat Daerah harus selaras dengan Program kegiatan RPJMD agar lebih fokus dalam pencapaian Kinerja

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
12 Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	101,02	96,58	4,44

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1 Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	377.900.000	374.129.702,00	99
2 Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	2 Persentase Perjanjian Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	Persentase	20	20	100	700.000.000	675.905.347,00	96,56
3 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	669	109,67	1.350.000.000	1.329.846.848	98,51
4 Terwujudnya bantuan hukum dan aparat/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	15	17	113,33	650.000.000	633.312.821	97,43
5 Meningkatnya Kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi	5 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	65	66,89	102,91	929.500.000	923.428.160	99,35
6 Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100	352.650.000	279.907.386	79,37

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran				
						Pagu	Realisasi	%		
7	Meningkatnya Kualitas pengadaan barang/jasa melalui ULP	7	Pengaduan lelang melalui ULP	Pengaduan	5	1	0,2	5.191.902.000	4.671.371.288	89,97
8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8	Tingkat Inflasi Kaltim	Persentase	5,5	3,24	58,91	1279.800.000	1264.167.731	98,78
		9	Pertumbuhan Ekonomi Kaltim	Persentase	4,7	2,67	56,81			
9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	10	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5	6,08	82,24	3.623.400.000	3.180.086.230	87,77
10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100	7.218.773.000	7.167.280.390	99,29
11	Terwujudnya organisasi tataaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	12	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	85	82,15	96,65	326.200.000	323.842.250	99,28
		13	Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	80	74,89	93,61	184.000.000	161.888.150	87,98

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2018, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Prov. Kaltim. Penyusunan LKJIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Prov. Kaltim.

Secara garis besar dari hasil analisis LKJIP Sekretariat Daerah Prov. Kaltim tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa ada 7 (tujuh) indikator sasaran Sekretariat Daerah Prov. Kaltim memperoleh capaian sampai 100 persen, yaitu:

- 1) Predikat LPPD
- 2) Jumlah produk hukum yang ditetapkan
- 3) Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum
- 4) Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas
- 5) Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana
- 6) Prosentase berita positif pembangunan daerah
- 7) Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terima Kasih.